DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan ke-	:	I (satu)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Mendikbudristek RI
Hari/Tanggal	:	Senin, 26 September 2022
Pukul	:	10.00 – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	:	Dr. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Acara	:	Pembahasan RKA K/L dan RKP TA 2023 Kemendikbudristek RI sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI
Hadir Komisi X DPR RI	:	38 dari 53 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	:	**Nadiem Anwar Makarim** (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi RI) beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.25 WIB oleh Dr. Abdul Fikri Faqih/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbudristek RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. PEMBAHASAN RKA K/L RAPBN TA 2023 HASIL BANGGAR DPR RI

1. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c dan huruf f UU No.42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor

B/16721/AG.05.02/09/2022 tertanggal 20 September 2022, Komisi X DPR RI menyetujui pagu definitif Kemendikbudristek RI RAPBN TA 2023 sebesar Rp.80.221.010.125.000,- (*Delapan puluh triliun dua ratus dua puluh satu miliar sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian per unit eselon I sebagai berikut:

Per Unit Utama

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN TA 2023
Sekretariat Jenderal	34.040.663.178.000
Inspektorat Jenderal	201.110.601.000
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	2.509.889.132.000
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	956.724.604.000
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	558.467.934.000
Ditjen Kebudayaan	1.779.310.942.000
Ditjen Guru dan Tendik	4.223.183.362.000
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	29.304.650.560.000
Ditjen Pendidikan Vokasi	6.647.009.812.000
Total	**80.221.010.125.000**

Per Program

PROGRAM	PAGU ANGGARAN TA 2023
PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	8.708.496.945.000
Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.282.655.238.000
Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	14.818.624.988.000
Pendidikan Tinggi	31.527.253.251.000
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.046.031.657.000
Dukungan Manajemen	19.837.948.046.000
Total	**80.221.010.125.000**

2. Terhadap alokasi anggaran sebagaimana tercantum dalam angka II.A.1., masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, sebagai berikut:

NO	FRAKSI	SIKAP
1	F-PDI Perjuangan	Setuju Dengan Catatan
2	F-Golkar	Setuju Dengan Catatan

NO	FRAKSI	SIKAP
3	F- Gerindra	Setuju Dengan Catatan
4	F-Nasdem	Setuju Dengan Catatan
5	F-PKB	Setuju Dengan Catatan
6	F-PD	Setuju Dengan Catatan
7	F-PKS	Belum Dapat Menyetujui
8	F-PAN	Setuju Dengan Catatan
9	F-PPP	Tidak hadir/izin dan tidak memberikan pendapat

3. Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, akan dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI selama pembahasan RAPBN TA 2023 yang telah dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka pengawasan sesuai Pasal 227 ayat (3) UU No.42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyerahkan bahan tertulis mengenai RKA/KL TA 2023 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU Tentang APBN TA 2023 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI.
5. Mengingat adanya usulan perubahan hasil raker tanggal 8 September 2022, maka Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan revisi bahan raker, yang diparaf dan disepakati oleh Mendikbudristek RI pada hari ini tanggal 26 September 2022. Oleh karena itu perlu dilakukan pendalaman terhadap program, kegiatan dan anggaran tersebut, dengan memperhatikan seluruh catatan anggota Komisi X DPR RI sebagai pandangan yang tidak terpisahkan. Pendalaman akan dilakukan sebelum tanggal 3 Oktober 2022.
6. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI cq Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi sesuai dengan tupoksinya terhadap program prioritas kementerian dari tahun 2020 s/d 2022, hasil kajian agar disampaikan ke Komisi X DPR RI paling lambat 15 Desember 2022.

B. <u>LAIN-LAIN</u>

Komisi X DPR RI mendesak Mendikbudristek RI untuk melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dalam hal penyusunan dan pembentukan regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, seperti dalam penyusunan RUU Sisdiknas.

C. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI, paling lambat tanggal 3 Oktober 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.11 WIB

MENDIKBUDRISTEK RI,

NADIEM ANWAR MAKARIM

KETUA RAPAT,

DR. ABDUL FIKRI FAQIH, MM.